

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten se-daratan Flores maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis statistik deskriptif dapat memberikan informasi mengenai nilai minimum dan maksimum data pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung, nilai minimum data secara berturut-turut yaitu sebesar Rp. 6.494.395.244,06; Rp. 193.062.072.197,00; Rp. 21.065.970.641,00 dan Rp. 27.108.132.915,00. Sedangkan nilai maksimum data pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Langsung, secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 169.920.911.284,19; Rp. 654.995.752.000,00; Rp. 271.923.106.395,00 dan Rp. 562.610.151.321,00.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten se-daratan Flores. Dimana nilai thitung PAD sebesar 3,915 dan nilai thitung DAK sebesar 5,068 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung dimana nilai thitung

sebesar -0,022 dan nilai signifikansi sebesar 0,982 lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau 5%.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten se-daratan Flores Dimana nilai Fhitung sebesar 31,595 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%.
4. Hasil koefisien determinasi (R^2) adalah 0,702 yang berarti 70,2% merupakan variasi variabel dependen yaitu Belanja Langsung (Y) dapat dijelaskan atau merupakan kontribusi dari ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3). Sedangkan sisanya 29,8% dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat diluar model ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh paling tinggi terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten daratan Flores. Maka sebaiknya Pemerintah Daerah lebih mengoptimal dan menggali sumber-sumber Penerimaan Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah untuk setiap Kabupaten se-daratan Flores terus meningkat dari tahun ke tahun.

2. Pemerintah Daerah harus mengolah dengan baik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja Langsung
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten se-daratan Flores dengan menambah variabel independen lainnya agar variabel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih bervariasi sehingga mampu mendapatkan hasil koefisien determinasi (R^2) yang lebih besar dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani & Yasa. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Dessy Tri Wulansari. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim & Muhammad. (2013). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- <http://gurupendidikan.co.id/pengertian-pendapatan/read/html>.
- <https://kamus.tokopedia.com/dana/read/html>.
- <http://pendidikanekonomi.com/pengertian-belanja/read/html>.
- <http://primalifejournal.wordpress.com/read/html>.
- <http://terinspirasi.komunikasi.blogspot.com/pengertian-kondisi-objektif/read/html>.
- <http://ttskab.go.id/read/html>.
- Kabupaten Flores Timur - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Flores_Timur
- Kabupaten Sikka - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maumere_Sikka

- Kabupaten Ende - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende
- Kabupaten Nagekeo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagekeo
- Kabupaten Ngada - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngada
- Kabupaten Manggarai Timur - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Timur
- Kabupaten Manggarai - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai
- Kabupaten Manggarai Barat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (2023). diakses 20 Juni 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Barat
- Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Malang: Erlangga.
- Kusnadi. (2000). *Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur, dan Metode)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Masayu Rahma Wati & Catur Martian Fajar. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Bina Sarana Informatika.
- Muhammad Syukri & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*. Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma.
- Ndadari & Adi. (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.

- Ningrum, Widyaswari. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- _Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- _Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- _Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- _Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Perubahan Peraturan Dana Perimbangan.
- _Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- _ PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Samad & Iyan. (2013). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Binawidya.
- Sasana. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sihite (2016) dan Darwanto (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung
- Simanjuntak. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Soesantoro, Hadi. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyanta (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Tuanakotta, Theodorus. (2000). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- _Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor, dan M. Nordiansyah. (2015). *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianus Lisa & Priyagus. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.